

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN TINJAUAN IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM SISTEM EKONOMI

Syahrial Syarbaini
PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510
syahrialsarbaini@gmail.com

Abstract

The economic system in which the characteristics of Pancasila values manifest in the Indonesian economic process which has been put forward by the economic leaders of Indonesia. Economic growth is an important prerequisite in the effort to improve the welfare of the community, For that economic activity should compress the values of Pancasila in the economy. Moral and ethical principles embodied in economic development, recognizing and treating human beings according to their dignity, being able to place unity, unity, and the interests and safety of the nation and state as a common interest over personal and group interests, the participation of all members of society in the process National production and occupies a very important position in the people's economic system. Every citizen is entitled to decent work and livelihood for humanity, participation of all members of society in participating in the enjoyment of national production. The production activities and the sharing of national production proceeds shall take place under the leadership or possession of the members of the community, each citizen should develop a fair attitude towards others, maintain a balance between his rights and obligations and respect for the rights of others

Keywords: Pancasila, development, economic system

Abstrak

System ekonomi dimana ciri-ciri nilai-nilai Pancasila terwujud dalam proses perekonomian Indonesia yang telah dikemukakan oleh para tokoh ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu prasyarat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Untuk itu kegiatan ekonomi harus menempatkan nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian. kaidah-kaidah moral dan etika terwujud dalam pembangunan ekonomi, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional dan menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. kegiatan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibanya serta menghormati hak-hak orang lain

Kata Kunci: Pancasila, pembangunan, system ekonomi

Pendahuluan

Pembangunan nasional telah dilaksanakan semenjak kemerdekaan Indonesia, khususnya pada pemerintahan Orde baru dilakukan secara berencana dan bertahap dalam berbagai bidang kehidupan. Secara formal pembangunan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, namun secara riil pembangunan semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam bidang ekonomi, yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat lihat semakin jauh pemisahan antara kaya dengan miskin dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia yang menimbulkan semakin meningkatnya wilayah dan permukiman miskin sementara segelintir orang dapat menguasai perekonomian Negara, maka artikel ini akan membahas tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam system perekonomian Indonesia? Dalam menjawab pertanyaan tersebut pembahasan terfokus kepada perbincangan tentang Wacana Sistem Ekonomi Pancasila, Arah dan Haluan Sistem Ekonomi Pancasila, Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Pembangunan, Aktualisasi sila Ketuhanan Yang Mahas Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wacana Sistem Ekonomi Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia merupakan pan-

dangan hidup (*weltanचाung*) bagi bangsa Indonesia. Sedangkan UUD 1945 merupakan landasan konstitusional. Sebagai suatu system ekonomi, Pancasila berbeda dengan system ekonomi kapitalisme, sosialisme dan system ekonomi alternative lainnya yang berkembang di dunia saat ini. Sistem ekonomi berdasarkan Pancasila lebih memilih jalan sendiri dalam suatu system. Sistem masyarakat ekonomi menganut system ekonomi yang sesuai dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Sistem ekonomi adalah system yang berkerja di bidang ekonomi dan berkaitan erat dengan ideology yang dianut oleh masyarakatnya, fungsinya menjaga keserasian antara efisiensi dan keadilan (Ismail, dkk 2014). Dasar ideology yang berbeda akan memberikan jawaban yang berbeda pula, pemahaman inilah yang menjadi prinsip dalam melihat system ekonomi berdasarkan Pancasila. Beberapa tokoh dapat kita lihat pandangannya tentang system ekonomi Pancasila, antara lain:

Pemikiran Bung Hatta

Bung Hatta dalam pemikiran beliau menyebutkan system ekonomi Indonesia dengan “system ekonomi ter-pimpin”, kedaulatan ekonomi harus seiring dengan kedaulatan politik yang kita tidak tergantung kepada kekuatan asing sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 45 yang berisikan “kemampuan masyarakat dan bangsa dengan semangat ber-dikari, memiliki individualitas, oto aktifas, memiliki harga diri, kepercayaan kepada diri sendiri serta jiwa bangsa yang berkepribadian, dengan wujudnya

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat erat dengan pengembangan dan pembangunan pengusaha kecil” (Subiakto dkk. 2017: 66). Pokok-pokok pikiran Bung Hatta dalam ekonomi terpimpin antara lain:

- 1) Merealisaikan jalur-jalur pemerataan yang memperbesar kemakmuran rakyat secara adil dan merata sesuai dengan cita-cita UUD 1945
- 2) Menggerakkan kekuatan ekonomi menuju kesatuan ekonomi dan kerukunan ekonomi nasional, tidak dibenarkan dominasi ekonomi melainkan berperan sejajar antara pelaku ekonomi.
- 3) Mencerminkan politik kemakmuran dengan membangun daya beli rakyat, memperbesar produksi dan menyediakan lapangan kerja.

Sikap yang harus ditanamkan dalam membangun system ekonomi adalah hidup sederhana, hemat dan tidak boros terutama dalam keuangan Negara, kekayaan Negara dan kekayaan alam berdasarkan dasar-dasar moral dan perikemanusiaan. Landasan ekonomi terpimpin adalah UUD 1945 yaitu Pasal 33 berkaitan dengan system ekonomi sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan, (system ekonomi koperasi), Pasal 27 ayat 2 mengenai hak-hak social warga Negara, dan Pasal 34 mengenai tugas Negara (Subiakto: 68). Dalam system ekonomi pelaku ekonomi yaitu Koperasi dengan member peluang perusahaan Negara (BUMN) dan perusahaan swasta.

Pemikiran Soemitro Djojohadikoesoemo

Ekonomi Pancasila menurut Soemitro memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Subiakto: 72):

- 1) Ikhtiar untuk selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Ikhtiar untuk membrantas atau mengurangi kemiskinan dan pengangguran,
- 3) Pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraannya tidak membahayakan persatuan bangsa dan Negara.
- 4) Rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan.
- 5) Pola penataan produksi dan hasil secara lebih merata sehingga terlaksananya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemikiran Emil Salim

Emil Salim, juga berdasarkan UUD 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (masa Orde Baru) menyebutkan lima ciri-ciri Pancasila (Subiakto:71-72), yaitu:

- a) Usaha Negara dan swasta tumbuh berdampingan tanpa dominasi,
- b) Hubungan kerja antara lembaga-lembaga ekonomi tidak didasari dominasi modal seperti ekonomi kapitalis, tidak didasari pada dominasi buruh seperti system ekonomi komunis melainkan derajat manusia seutuhnya.
- c) Terbuka kesempatan yang bagi kelompok masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan hidup,
- d) Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, dimana peranan Negara me-

nguasai alam melalui jalur pengaturan, perencanaan dan pengawasan.

e) Pancasila sebagai suatu nilai yang mempengaruhi pelaku ekonomi

Pemikiran Mubyarto

Ciri-ciri spesifik ekonomi Pancasila (Subiako: 73) sebagai berikut:

- 1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, social dan moral.
- 2) Kehendak dari seluruh masyarakat kearah pemerataan social (egalitarianism) sesuai dengan asas kemanusiaan.
- 3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional dimana nasionalisme menjiwai tiap-tiap kebijakan ekonomi.
- 4) Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama.
- 5) Perimbangan dalam perencanaan dalam kegiatan ekonomi di tingkat nasional dengan desentralisasi untuk menjamin keadilan social.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara(GBHN) tahun 1973 – 1999, menyatakan bahwa ciri-ciri positif dan netatif ekonomi Indonesia, ciri-ciri positif adalah sebagai berikut:

- a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas usaha kekeuargaan,
- b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang dikuasai orang banyak dikuasai oleh Negara,
- c) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,

- d) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaanya yang ada pada lembaga perwakilan rakyat pula,
- e) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatanya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat,
- f) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum,
- g) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Sedangkan tiga ciri-ciri negative system ekonomi adalah:

- 1) System *free fight liberalism*, yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain dalam sejarahnya di Indonesia telah menumbuhkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia,
- 2) System *etatisme*, dimana Negara beserta aparatur ekonomi bersifat dominan serta mendesak dan mematikan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sector Negara.
- 3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Sri Edi Swasono memaknai system ekonomi Pancasila sebagai system ekonomi berorientasi pada sila-sila Pancasila, (Subiako: 76) yaitu:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa, berlaku etika dan moral agama dan bukan materialism,
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan dan penghisapan,
- c) Persatuan Indonesia, memiliki sifat kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, tidak saling mematikan dan nasionalisme,
- d) Kerakyat, yaitu adanya demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak,
- e) Keadilan social, adanya persamaan dan kemakmuran rakyat bukan kemakmuran orang perorangan.

Terdapat perbedaan yang cukup tajam antara paradigma ekonomi liberalisme dengan demokrasi ekonomi menurut Sri Edy Suasono (Subiakto dkk. 77) sebagai usaha menggambar bagaimana ciri-ciri ekonomi yang sesuai dengan Pancasila yang dapat dilihat dari table berikut:

Perbedaan Paradigma Ekonomi Liberalisme dengan Demokrasi ekonomi

Ekonomi Liberalisme/Kapitalisme

- Liberalism
- Individualism
- Kompetitisme
- Daulat pasar
- Homo economicus
- Mengutamakan modal
- Maksimum keuntungan individu
- Eksploitasi ekonomi
- Pemilikan bisnis berbasis individual

Demokrasi ekonomi

- Mutualisasi/kebersamaan
 - Kekeluargaan
 - Kooperativisme
 - Daulat rakyat
 - Homo humanus
 - Homo socius
 - Homo ethicus
 - Homo religious
 - Homo magnifies
 - Mengutamakan manusia
 - Maksimum kesejahteraan social
 - Pemilikan bisnis berbasis publik
-

Arah dan Haluan Sistem Ekonomi Pancasila

Sesuai dengan amanat alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "... untuk memajukan kesejahteraan umum..." merupakan tugas utama pemerintah untuk mewujudkannya melalui suatu pembangunan nasional. Pada dasarnya pembangunan nasional adalah dari, oleh dan untuk rakyat yang dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan bangsa yaitu meliputi

aspek politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.

Pembangunan nasional merupakan upaya kehendak rakyat secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dalam usaha mewujudkan cita-cita Negara sebagaimana tersebut dalam pembukaan UUD 1945 maka dibutuhkan visi atau arah yang menjadi tuntunan pembangunan nasional Indonesia yaitu mewujudkan masya-

rakat Indonesia yang bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju dan mandiri.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu prasyarat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, cita-cita pembangunan nasional adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat, oleh sebab itu kebijaksanaan pembangunan ekonomi harus dilaksanakan melalui pertumbuhan yang mewujudkan pemerataan, sesuai dengan pandangan Bung Hatta bahwa dalam ekonomi terpimpin tujuan pertumbuhan pendapatan nasional harus menjadi satu dengan memperbesar kemakmuran secara merata dan seadil-adilnya (Subiakto dkk. 2017: 106).

Pembangunan nasional harus juga dapat menjamin pembangunan yang lestari serta berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh generasi ke-generasi selanjutnya. Pembangunan lestari sebagaimana Bung Hatta pernah menyatakan dalam tulisannya (Subiakto dkk. 2017 : 107):

“Pemuda Indonesia harus cepat mengemudi menuju arah yang tepat. Tugasnya adalah mempercepat datangnya hari yang baru. Ia harus mengajarkan kepada rakyat untuk menikmati keindahan hidupnya, jangan hanya kesengsaraan saja harus menjadi nasib rakyat . semoga bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaan di bawah langit yang biru dan merasa dirinya sebagai yang mempunyai negeri, kurnia rahmat Tuhan”.

Menikmati kemerdekaan di bawah langit yang biru dapatlah ditafsirkan sebagai citacita melakukan pembangunan nasional, yang ramah lingkungan dan lestari bagi generasi

bangsa Indonesia kini dan di masa yang mendatang.

Untuk mencapai tujuan pembangunan dibutuhkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang meliputi: 1) pajak dan non pajak, 2) hutang dengan menerbitkan surat-surat berharga hutang Negara atau obligasi, dan 3) bantuan luar negeri. Sistem ekonomi Pancasila berupa partisipasi aktif seluruh masyarakat termasuk pembiayaan pembangunan nasional dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan nasional sebagai perwujudan system ekonomi Pancasila harus meliputi berbagai aspek, yaitu:

1. Pembangunan industry, yang meliputi industry pengelolaan (manufacturing), jasa (industry kreatif, industry informasi serta komunikasi), pembangunan industry Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk partisipasi total seluruh rakyat yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.
2. Perdagangan, produk-produk yang dihasilkan oleh sector industry harus didistribusikan kepada masyarakat melalui kegiatan perdagangan, system ekonomi Pancasila menunjukkan kebijakan perdagangan melalui industry pasar yang berkeadilan. Konsep pasar yang berkeadilan adalah sebuah tata perdagangan yang dijalankan oleh antar pelaku ekonomi yaitu BUMN, koperasi dan swasta melalui strategi kemitraan yang setara.
3. Keuangan dan fiskal, sektor keuangan meliputi moneter merupakan

bagian penting dalam mendukung industry dan perdagangan, keberadaan uang akan menyebabkan timbulnya efisiensi dan kelancaran dalam bertransaksi. Fasilitas keuangan disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya, seperti pasar uang dan pasar modal atau lembaga keuangan perbankan dan bukan bank. Fiskal sebagai system pendukung pembangunan nasional harus bertujuan untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat dengan menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan kesempatan kerja, mengendalikan inflasi, meningkatkan dan mendistribusikan pendapat nasional dan investasi.

4. Jaminan social, sebagai salah satu komponen kesejahteraan yang bersifat tetap dan berkelanjutan, karena fungsinya sebagai pengganti hilangnya pendapat masyarakat yang bekerja sebagai akibat adanya resiko ekonomi yang berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan tenaga kerja baik dalam industry maupun diluar hubungan industry sehingga sebagian masyarakat tidak kehilangan pekerjaan (Purwoko.(dlm) Subiakto. 2017: 153). Jaminan social dapat terselenggara melalui partisipasi total seluruh rakyat yang diatur oleh Negara sehingga jaminan social itu merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga Negara, sesuai dengan pasal 33 dan 34 UUD 1945

Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Pembangunan

Penerapan system ekonomi berdasarkan Pancasila adalah bagaimana mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aktifitas ekonomi sehingga hasil dirasakan sebagai kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu kegiatan ekonomi harus menampatkan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila.

Aktualisasi sila Ketuhanan Yang Mahas Esa

Berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadikan landasan spiritual, moral dan etika bagi penyelenggaraan pembangunan ekonomi, dengan demikian ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika sehingga pembangunan dapat meningkat akhlak warga Negara. Pancasila yang sudah disepakati sebagai dasar Negara etika dalam kehidupan bernegara, tentu sudah semestinya hasil pembangunan ekonomi sebagai hasil usaha bersama yang dapat menciptakan terwujudnya nilai-nilai Ketuhanan YME.

Demokrasi ekonomi merupakan bentuk ekonomi sosialis religius. Disebut sosialis karena berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 yang dijiwai ruh sosialisme dengan adanya kepemilikan faktor-faktor produksi hajat hidup orang banyak oleh negara dan dengan adanya asas kebersamaan yang melandasi kegiatan perekonomian. Namun, tidak hanya sosialis, demokrasi ekonomi yang ditawarkan Bung Hatta juga bercorak religius karena dijiwai oleh Pancasila yang sila pertamanya

adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa tidak ada satupun agama di dunia yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk menomorsatukan individualisme. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi ekonomi memiliki basis ontologis pada tradisi komunalisme yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat yang berketuhanan dan beragama di nusantara

Aktualisasi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pembangunan bidang ekonomi

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen (beraneka ragam). Pancasila kemudian menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyak sekali nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dan harus kita terapkan, antara lain : Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menyambut tantangan ke depan bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah

tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Di samping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotak-kotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu tolok ukur sisi humanistik dari ekonomi adalah keadilan. Tidak adanya diskriminasi bagi setiap warga negara berarti mengakui bahwa dibalik setiap perbedaan warga negara ada sebuah kesamaan, yaitu sebagai manusia yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban setara yang diakui undang-undang dan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan universal. Inilah dimensi humanistik dalam perekonomian. Hal ini ditandai dengan kesamaan peluang dan akses (equal opportunity) bagi setiap warga negara dalam berekonomi dan menikmati pembangunan ekonomi. Dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebagai sila pamungkas Pancasila disini seyogianya juga menjadi tujuan dari pelaksanaan ekonomi di Indonesia.

Berbicara keadilan maka bisa dilihat dari adanya pemerataan hasil pembangunan ekonomi di Indonesia yang mana pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar tumbuhnya rezim Orde Baru. Pemerintah Orde Baru bukannya tidak berusaha mengatasi ketidaksesuaian rencana dan hasil pembangunan ekonomi berupa ketimpangan dan belum meratanya hasil pembangunan. Sejak Pelita III (1979 - 1984) terjadi perubahan pokok. Trilogi

Pembangunan yang pada mulanya, urutannya ialah pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Kemudian sejak Pelita tersebut diubah menjadi pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas. Disusul pula dengan penancangan dua pokok kebijaksanaan pembangunan, yaitu: (1) mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan (2) melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan.

Pemerataan ekonomi yang akan dicapai tidak hanya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang humanistik, namun juga mengamalkan amanat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wujud nyata dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab itu dapat dipertimbangkan beberapa prinsip pemikiran implementatif dalam bidang ekonomi, antara lain:

- a. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
- b. Saling mencintai sesama manusia.
- c. Mengembangkan sikap tentang rasa.
- d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- f. Berani membela kebenaran dan keadilan.

- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Nilai-nilai tersebut diatas dapat diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yaitu:

- a. Distribusi pendapatan dalam suatu kegiatan usaha sesuai dengan hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing.
- b. Membantu pekerja yang lemah baik melalui bimbingan keterampilan maupun dalam bentuk material.
- c. Gemar memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain
- d. Mengakui bahwa keberhasilan suatu usaha atas kerja semua pihak
- e. Menghormati rekan kerja serta menjamin hubungan baik antara orang-orang yang terlibat dalam komunitas produsen dengan konsumen.

Aktualisasi sila Persatuan Indonesia dalam pembangunan bidang ekonomi

Paham nasionalisme dengan kegiatan ekonomi suatu negara sungguh terkait erat. Perkembangan ekonomi dunia yang semakin pesat telah dimulai semenjak terjadinya proses pengintegrasian berbagai kawasan di dunia seiring dengan keberadaan kolonialisme negara Eropa di Amerika, Asia, dan Afrika antara abad 16 sampai 20 Masehi. Kolonialisme itu sendiri merupakan manifestasi dari nasionalisme chauvinistik negara-negara Eropa berupa imperialisme yang berambisi meningkatkan kekayaan nasional (gold), mengukuhkan peran sebagai aktor peradaban dunia baru dengan panduan

kitab suci, dan mengunggulkan kejayaan dan kebanggaan diri.

Globalisasi sebagai suatu isme yang mulai dianut sebagian besar negara di dunia ini telah menjadi suatu keniscayaan historis yang tidak terbantahkan meski tersimpan agenda kepentingan nasional negara maju di dalamnya. Motor paling kuat di balik globalisasi adalah kepentingan ekonomi murni, yaitu hasrat memaksimalkan profit. Bagaimana pasar di negara berkembang terbebas dari berbagai regulasi dengan serangkaian konsep *free trade*, sedangkan produk-produk negara berkembang dibatasi masuk dalam pasar di negara maju.

Dalam mengaktualisasikan sila Persatuan Indonesia dalam bidang ekonomi dapat dipertimbangkan beberapa prinsip pemikiran implementatif, antara lain:

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Aktualisasi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam pembangunan bidang ekonomi

Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, ada tiga unsur demokrasi ekonomi yaitu aspek produksi, aspek distribusi, dan aspek kepemilikan usaha bersama oleh rakyat. Adapun garis besar substansinya dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Hal itu sejalan dengan bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan, Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kedua, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota turut serta menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal itu antara lain dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Wujud kongkrit dari demokrasi ekonomi yaitu dengan tersedianya sistem jaminan sosial nasional yang mencakup kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Ketiga, kegiatan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka

perwujudan demokrasi ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek, namun harus diupayakan agar menjadi subyek perekonomian

Melalui sila keempat aparat negara yang membuat kebijakan negara diarahkan oleh hikmat/kebijaksanaan, maka mereka akan ingat bahwa apapun pemikiran yang dimiliki harus didasarkan pada kepentingan masyarakat Indonesia secara umum, terlepas dari partai politik atau golongan si wakil rakyat.

Dalam rangka mengaktualisasikan sila keempat dalam bidang ekonomi dapat dipertimbangan alternatif perilaku sebagai berikut:

1. Keseimbangan hak dan kewajiban
2. Mewujudkan rasa keadilan sosial
3. Hak masyarakat atau warga perkerja untuk tahu
4. Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main yang berlaku
5. Membiasakan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah
6. Selalu bertanggung jawab atas keputusan musyawarah
7. Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun
8. Itikat baik dengan penuh tanggung jawab dalam menerima suatu tugas dan jabatan.
9. Dll.

Aktualisasi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembangunan bidang ekonomi

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diuraikan secara singkat sebagai suatu tata masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap warga

mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakekat manusia adil dan beradab. Perwujudan dari sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pengamalannya, setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain.

Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri dan dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diuraikan secara singkat sebagai suatu tata masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakekat manusia adil dan beradab. Perwujudan dari sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pengamalannya, setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain.

Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri dan dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang

bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Pemerataan perekonomian di Indonesia masih perlu dilaksanakan. Hal ini perlu dikarenakan pertumbuhan ekonomi antar daerah masih berbeda. Jika pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak merata, ini menyebabkan ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lain. Pemerintah dalam mengatasi hal ini menggalakkan pemerataan penduduk, pemerataan perekonomian dengan program pinjaman modal dan lain-lain. Langkah pemerintah tersebut berguna untuk mewujudkan pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerataan perekonomian di Indonesia masih perlu dilaksanakan. Hal ini perlu dikarenakan pertumbuhan ekonomi antar daerah masih berbeda. Jika pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak merata, ini menyebabkan ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lain. Pemerintah dalam mengatasi hal ini menggalakkan pemerataan penduduk, pemerataan perekonomian dengan program pinjaman modal dan lain-lain. Langkah pemerintah tersebut berguna untuk mewujudkan pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam mengaktualisasikan sila Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang ekonomi dapat dilakukan sikap berikut ini:

- 1) Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, manusia harus bekerjasama dengan manusia lain dalam masyarakat. Manusia mustahil dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dicapai dan kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia pada dasarnya adalah berkat bantuan dan kerjasama orang lain di masyarakat.

- 2) Tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

Masih sering kita jumpai kasus-kasus suap, pungli, sogokan marak di segala bidang. Bukan hanya badan usaha milik pemerintah, badan usaha milik swasta juga dapat kita jumpai pungli, suap, sogokan. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan negara. Masyarakat dirugikan karena melakukan pengorbanan yang lebih banyak dari pada peraturan yang telah ditetapkan dan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dikarenakan pungli, sogokan dan suap. Sedangkan negara menderita kerugian dikarenakan sesuatu yang seharusnya benar kelak menjadi salah. Semisal penerimaan pegawai negeri, pemerintah dirugikan oleh karena calon yang diterima berdasar pada banyaknya suap bukan karena standar penerimaan yang telah ditetapkan. Jika penyelewengan penggunaan usaha untuk pemerasan ini tidak dibenahi, boleh jadi hukum kelak bisa di beli.

- 3) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

Indonesia memiliki hasil bumi yang sangat melimpah. Dari sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, kelautan, dan lain-lain. Semua hasil bumi tersebut menjadikan Indonesia kaya akan hasil bumi. Walaupun demikian banyak kekayaan Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia tidak diperbolehkan menggunakan kekayaan negara tersebut dengan berlebihan dan gaya hidup mewah. Karena di antara sumber daya alam tersebut ada sebagian yang tidak dapat diperbaharui dan masih banyak saudara kita yang memiliki kehidupan yang tak layak. Sedangkan Indonesia memiliki berjuta kekayaan yang seharusnya turut di nikmati seluruh rakyat Indonesia.

- 4) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau kepentingan umum.

Sering kita mendengar kasus - kasus koruptor yang menjamur di Indonesia. Korupsi dapat jadi karena koruptor melaksanakan hak -hak asasi manusia cenderung untuk berlebihan, sehingga merugikan negara dan masyarakat. Seharusnya, manusia lebih memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan kepentingan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dipertimbangkan alternative berikut:

1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
2. Bersikap adil.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak-hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak bersifat boros.
8. Tidak bergaya hidup mewah.
9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10. Suka bekerja keras.
11. Menghargai hasil karya orang lain.
12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Kesimpulan

Pancasila berbeda dengan system ekonomi kapitalisme, sosialisme dan system ekonomi alternative lainnya yang berkembang di dunia saat ini. Sistem ekonomi berdasarkan Pancasila lebih memilih jalan sendiri dalam suatu system. kedaulatan ekonomi harus seiring dengan kedaulatan politik yang kita tidak tergantung kepada kekuatan asing sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 45. Tugas utama pemerintah untuk mewujudkannya melalui suatu pembangunan nasional. Pada dasarnya pembangunan nasional adalah dari, oleh dan untuk rakyat yang dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan bangsa yaitu meliputi aspek politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.

Pembangunan nasional merupakan upaya kehendak rakyat secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Penerapan system ekonomi

berdasarkan Pancasila adalah bagaimana mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aktifitas ekonomi sehingga hasil dirasakan sebagai kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu kegiatan ekonomi harus menempatkan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis perlu sarankan sebagai berikut:

- 1) Perlunya pemerintahan pembimbing, pengarah dan penuntun dalam pembangunan nasional berupaya melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada segenab pelaku ekonomi dalam berbagai kesempatan.
- 2) Perlunya lembaga legislasi baik pada tingkat pusat dan daerah menjadikan Pancasila sebagai alat control produk perundang-undang dalam kebijakan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Alfian. (1992). Pancasila sebagai ideology dalam kehidupan politik. Dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (Pnyt) Pancasila sebagai Ideologi: dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jakarta. BP7-Pusat.
- Boediono. 2016. Ekonomi Indonesia: Dalam lintasan sejarah. Mizan. Bandung.
- Ismail, Munawar; Santoso, Dwi Budi; Yustika, Ahmad Erani. 2014. Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Jakarta. Erlangga.
- Indonesia, MPR. GBHN. 1973 – 1999.
- Kaelan. 2013. Negara kebangsaan Pancasila. Yogyakarta. Paradigma.
- Latif, Yudhi. 2011. Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Jakarta. Gramedia .
- Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR-RI). 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 194 dan Penjelasannya (Naskah Asli). Jakarta. Sekjen MPR-RI.
- _____ (1998) Ketetapan MPR-RI No.II/1998tentang GBHN, Jakarta. Sekjen MPR-RI.
- _____ (2001) KetetapanI No. VII?MPR/2001. Tentang Visi Indonesia Masa depan. Jakarta. Sekjen MPR-RI.
- Tjakrawerdaja, Subiacto dkk. 2017. Sistem ekonomi Pancasila. Jakarta. Rajawali Press.